

**RANCANGAN CASCADING KINERJA ESSELON II SAMPAI DENGAN ESSELON IV
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
TAHUN 2021**

ES II												
No	Isu Strategis	Permasalahan	Tujuan	Indikator Kinerja	Target (Tahun 2023)	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Alasan Pemilihan Indikator	Formulasi/Penjelasan	Kondisi Awal (Tahun 2017)	Kondisi Awal (Tahun 2018)	Target Indikator Kinerja Sasaran (Tahun 2021)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	15
1	Masih rendahnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta pelayanan publik berkualitas berbasis teknologi informasi dalam bingkai kehidupan yang agamis, dengan permasalahan (1) Belum efektif dan efisiennya penyelenggaraan pemerintahan	Belum optimalnya penyelenggaraan pemerintah	1. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta layanan publik yang berkualitas berbasis teknologi informasi	Nilai/ Predikat AKIP	89,06 (A)	1. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai/Predikat AKIP	Sesuai Amanat Perpres No. 29 Tahun 2014 tentang SAKIP maka sebagai pemerintahan berorientasi pada akuntabilitas kinerja yang hasilnya diperoleh melalui evaluasi AKIP berdasarkan Permenpan No. 53 tahun 2014 tentang Juknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah	Hasil Evaluasi Internal dari Inspek	B	81,30 (A)	83,79 (A)
2	Adanya persepsi publik ASN belum profesional, dimana ASN profesional merupakan kebutuhan organisasi dan tuntutan kompetensi global	Belum ada standar/ukuran ASN yang profesional	2. Mewujudkan ASN yang profesional melalui penerapan sistem Merit	Indeks profesionalisme ASN	81,33	2. Terwujudnya ASN yang Profesional melalui Penerapan Sistem Merit	Indeks Profesionalisme ASN	Untuk mendukung reformasi birokrasi sesuai Peraturan presiden nomor 81 tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 yang ditindaklanjuti dengan peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2017 tentang manajemen ASN, dimana dalam pengelolaan manajemen ASN	$IP = \sum_{i=1}^4 IP_i$ $= IP_1 + IP_2 + IP_3 + IP_4$ Keterangan : IP _i = Indeks Profesionalisme ke-i IP ₁ = Indeks Profesionalisme Dimensi Kualifikasi IP ₂ = Indeks Profesionalisme Dimensi Kompetensi IP ₃ = Indeks Profesionalisme Dimensi Kinerja IP ₄ = Indeks Profesionalisme Dimensi Disiplin	48,63	58	74,42

**RANCANGAN CASCADING KINERJA ESSELON III SAMPAI DENGAN ESSELON IV
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
TAHUN 2021**

ES III								ES IV															
Program	Anggaran	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Penjelasan	Kondisi Awal (tahun 2017)	Kondisi Awal (tahun 2018)	Target (Tahun 2021)	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran	Sasaran Kegiatan	Penjelasan	Indikator Kinerja	Target (Tahun 2019)	Target (Tahun 2020)	Target (Tahun 2021)	Target (Tahun 2022)	Target (Tahun 2023)				
Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	7,279,026,750	Meningkatnya tata kelola administrasi perkantoran	Tingkat Kepuasan Pelayanan	Seluruh aspek pelayanan yang dilaksanakan dibagi dengan seluruh aspek pelayanan dikali 100%	100	100	100	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Administrasi Umum		963,693,750	Terlaksananya pelayanan, penatausahaan administrasi umum dan kepegawaian	Penunjang keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan urusan kepegawaian dan Diklat										
														Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1,500,000			Pelayanan administrasi sesuai standar	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan
														Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS	3,750,000			Pelayanan administrasi sesuai standar	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun
														Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	18,144,000			Pelayanan administrasi sesuai standar	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan
														Penyediaan Alat Tulis Kantor	69,835,500			Pelayanan administrasi sesuai standar	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan
														Penyediaan Barang Cetak dan Perenggandaan	89,025,000			Pelayanan administrasi sesuai standar	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan
														Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	5,760,000			Pelayanan administrasi sesuai standar	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan
														Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	135,020,000			Pelayanan administrasi sesuai standar	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan
														Penyediaan Bahan Logistik Kantor	16,460,000			Pelayanan administrasi sesuai standar	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun
														Penyediaan makanan dan minuman	24,725,000			Pelayanan administrasi sesuai standar	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun
														Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	24,000,000			Pelayanan administrasi sesuai standar	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun
														Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	5,250,000			Mobil dan kendaraan Operasional kondisi baik	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun
														Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	200,000,000			Pelayanan administrasi sesuai standar	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun
														Pemeliharaan Rutin/berkala gedung kantor	238,238,000			Pelayanan administrasi sesuai standar	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun
														Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2,517,500			Pelayanan administrasi sesuai standar	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun
														Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	77,668,750			Pelayanan administrasi sesuai standar	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun
														Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	26,000,000			Pelayanan administrasi sesuai standar	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun
														Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	25,800,000			Pelayanan administrasi sesuai standar	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun

ES III								ES IV											
Program	Anggaran	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Penjelasan	Kondisi Awal (tahun 2017)	Kondisi Awal (tahun 2018)	Target (Tahun 2021)	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran	Sasaran Kegiatan	Penjelasan	Indikator Kinerja	Target (Tahun 2019)	Target (Tahun 2020)	Target (Tahun 2021)	Target (Tahun 2022)	Target (Tahun 2023)
		Meningkatnya pemenuhan aspek kualitas dokumen AKIP	Tingkat pemenuhan aspek kualitas dokumen AKIP	Hasil Reviu AKIP	B	81,30	83,79 (A)	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		9,500,000		Penunjang keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan urusan kepegawaian dan Diklat	Dokumen AKIP memenuhi aspek Kualitas					
									Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah		2,000,000	Terpenuhiya dokumen AKIP dari aspek kualitas		Jumlah dokumen Renstra dan Renja yang disusun			3 laporan	3 laporan	3 laporan
									Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Dalam Dokumen Perencanaan		2,000,000			Jumlah program dan kegiatan perangkat daerah			2 laporan	2 laporan	2 laporan
									Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah		2,500,000			Jumlah dokumen evaluasi perangkat daerah			4 laporan	4 laporan	4 laporan
									Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah		1,500,000			Jumlah koordinasi dan sinkronisasi perencanaan perangkat daerah yang dilaksanakan			2 laporan	2 laporan	2 laporan
									Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		1,500,000			Jumlah Evaluasi kinerja perangkat daerah			4 laporan	4 laporan	4 laporan
		Meningkatnya pemenuhan aspek kualitas Keuangan Daerah	Tingkat pemenuhan aspek kualitas dokumen Keuangan Daerah	Hasil review Laporan Keuangan Daerah	100%	100%	100%	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Administrasi Keuangan		6,305,833,000	Terpenuhiya dokumen Keuangan Daerah dari aspek kualitas	Penunjang keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan urusan kepegawaian dan Diklat	Tingkat pemenuhan aspek kualitas dokumen AKIP					
									Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Semesteran		1,500,000	Terpenuhiya dokumen Keuangan Daerah dari aspek kualitas		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan / semesteran yang tersusun			12 laporan	12 laporan	12 laporan
									Penyusunan Laporan Prognosis Realisasi Anggaran		1,500,000			Jumlah Laporan Prognosis yang tersusun			1 laporan	1 laporan	1 laporan
									Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun		2,000,000			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun yang tersusun			1 laporan	1 laporan	1 laporan
									Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		15,000,000						1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun
									Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		6,285,833,000						1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun
Pengembangan Sumberdaya Manusia	5,151,557,840	Meningkatnya kompetensi sumber daya manusia Aparatur Sipil Negara sesuai dengan jabatannya	Persentase pegawai yang memiliki sertifikat diklat peningkatan kompetensi manajerial	Jumlah pegawai yang memiliki sertifikat diklat kompetensi manajerial dibagi dengan jumlah jabatan struktural yang terisi x 100%	50,89%	55,39%	71,00 %	Pengembangan Sumberdaya Manusia	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional		4,021,995,040			Jumlah pegawai yang memiliki sertifikat diklat manajerial, prajabatan dan ijin tugas belajar			263 orang		
							$\frac{340+36+10+20+20}{600} \times 100$		Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerjasama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, Serta jabatan Fungsional		1,322,200,000	Terlaksananya Diklat Manajerial	Jumlah Pejabat Es. II, III dan IV yang mengikuti Diklat Kepemimpinan baik dengan pola penyertaan(pengiriman) maupun pola Kemitraan (Penyelenggaraan di Hulu Sungai Selatan)	Jumlah Pegawai yang memiliki sertifikat diklat pim Tk. II, III dan IV	10 orang	37 orang	20 orang	10 orang	11 orang

ES III								ES IV											
Program	Anggaran	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Penjelasan	Kondisi Awal (tahun 2017)	Kondisi Awal (tahun 2018)	Target (Tahun 2021)	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran	Sasaran Kegiatan	Penjelasan	Indikator Kinerja	Target (Tahun 2019)	Target (Tahun 2020)	Target (Tahun 2021)	Target (Tahun 2022)	Target (Tahun 2023)
										Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar	850,000,040	Terlaksananya pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas	Jumlah pegawai yang diberi bantuan dalam penyelesaian tugas belajar yang diikuti	Jumlah pegawai yang mengikuti tugas belajar	8 orang	8 orang	16 orang	16 orang	16 orang
										Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	1,849,795,000	Terlaksananya Diklat Teknis Prajabatan bagi CPNS	Jumlah mengikuti Diklat Prajabatan baik dengan pola Penyerataan (Pengiriman ke BPSDMD Provinsi Kalimantan Selatan) maupun Pola Kemitraan (Penyelenggaraan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan)	Jumlah CPNS yang mengikuti Diklat Prajabatan	50 orang	201 orang	191 orang	250 orang	250 orang
		Meningkatnya kompetensi sumber daya manusia Aparatur Sipil Negara sesuai dengan jabatannya masing-masing	Persentase pegawai yang memiliki sertifikat diklat peningkatan kompetensi teknis	Jumlah pegawai yang memiliki sertifikat diklat peningkatan kompetensi teknis (diklat teknis tugas dan fungsi + diklat fungsional tertentu) dibagi dengan jumlah JFT (Jabatan Fungsional)	28,10%	29,52%	50,37 % $\frac{1.127+46+40+90+100}{2.785} \times 100$	Pengembangan Sumberdaya Manusia	Pengembangan Kompetensi Teknis		1,129,562,800			Jumlah pegawai yang memiliki sertifikat diklat peningkatan kompetensi teknis			450 orang		
										Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	1,016,562,800	Terlaksananya Diklat Kompetensi Teknis	Jumlah jabatan Fungsional Tertentu (JFT) yang mengikuti Diklat Peningkatan Kompetensi Teknis	Jumlah pegawai yang memiliki sertifikat Diklat Peningkatan Kompetensi Teknis	40 orang	40 orang	40 orang	70 orang	30 Orang
										Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitas, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknisumum, Inti, dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	113,000,000	Terlaksananya ujian dinas tk. I, ujian dinas tk. II dan ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah	Jumlah pegawai yang mengikuti ujian dinas	Jumlah pegawai yang mengikuti ujian dinas	14 orang	87 Orang	145 orang	145 orang	145 orang
Kepegawaian Daerah	2,836,572,900	Meningkatnya tata belola kepegawaian	Persentase tingkat penurunan pelanggaran disiplin PNS	Jumlah Kasus Tahun Lalu (n-1) - Jumlah Kasus Tahun Ini (n) dibagi jumlah Kasus Tahun Lalu (n-1) x 100	Penurunan 70%	Kenaikan 45%	20%	Kepegawaian Daerah	Pembinaan ASN		114,990,400			Jumlah PNS yang mengikuti sosialisasi Peraturan Kepegawaian			240 orang		
										Pembinaan Disiplin ASN	75,466,400	Terlaksananya pembinaan disiplin ASN	Pembinaan disiplin PNS merupakan upaya pembentukan sikap dan perilaku PNS dalam bekerja, agar dapat menciptakan suasana kerja yang kondusif dalam rangka melaksanakan pelayanan kepada masyarakat untuk mencapai tujuan organisasi	Jumlah PNS yang mengikuti sosialisasi Peraturan Kepegawaian	240 orang				
										Penegakkan Disiplin, Pemberian Penghargaan dan Perlindungan	39,524,000	Terlaksananya Penegakkan Disiplin, Pemberian Penghargaan dan Perlindungan	Pembinaan disiplin PNS merupakan upaya pembentukan sikap dan perilaku PNS dalam bekerja, agar dapat menciptakan suasana kerja yang kondusif dalam rangka melaksanakan pelayanan kepada masyarakat untuk mencapai tujuan organisasi	Jumlah laporan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS	5 laporan				

ES III								ES IV																					
Program	Anggaran	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Penjelasan	Kondisi Awal (tahun 2017)	Kondisi Awal (tahun 2018)	Target (Tahun 2021)	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran	Sasaran Kegiatan	Penjelasan	Indikator Kinerja	Target (Tahun 2019)	Target (Tahun 2020)	Target (Tahun 2021)	Target (Tahun 2022)	Target (Tahun 2023)										
Kepegawaian Daerah		Meningkatnya tata kelola kepegawaian	Persentase JPT (Jabatan Pimpinan Tinggi) yg melakukan kebijakan promosi terbuka untuk JPT sesuai dengan undang-undang ASN	Jumlah pejabat administrator yang mengikuti promosi terbuka dibagi jumlah jabatan pimpinan tinggi x 100%	21,87%	0%	9,38 % $\frac{3}{32} \times 100$	Kepegawaian Daerah	Pengembangan Karir ASN		413,474,800			Jumlah Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama yang diisi sesuai dengan kompetensi				1 jabatan											
												413,474,800	Terselenggaranya pembinaan dan pengembangan karier ASN	Jumlah jabatan pimpinan tinggi pratama yang akan diisi melalui lelang terbuka karena pejabatnya pensiun setiap jabatan pimpinan tinggi minimal diikuti 4 (empat) orang pejabat administrator, jumlah jabatan tinggi seluruhnya ada 32 jabatan	Jumlah Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama yang diisi sesuai dengan kompetensi	4 jabatan	2 jabatan	1 jabatan	2 jabatan	3 jabatan									
									Peningkatan Kapasitas ASN		911,125,400			Jumlah SKPD/unit Kerja yang telah menerapkan e kinerja dan melaporkan penilaian prestasi kerja				41 OPD											
										Peningkatan Kapasitas ASN	43,096,300	Terselenggaranya penerapan e kinerja pada 41 OPD	Jumlah OPD yang sudah menerapkan e kinerja sebanyak 41 OPD	Jumlah SKPD/unit Kerja yang telah menerapkan e kinerja dan melaporkan penilaian prestasi kerja	41 OPD	41 OPD	41 OPD	41 OPD	41 OPD	41 OPD									
										Fasilitasi Kelembagaan Profesi ASN (KORPRI dan lembaga profesi ASN lainnya)	868,029,100	Terlaksananya kegiatan sesuai dengan program kerja korpri	Terselenggaranya kegiatan LKKB (Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum) Korpri, HUT Korpri, Rapat Koordinasi Korpri, Pelayanan Kesehatan, Cendra mata purna tugas anggota korpri	Jumlah kegiatan terselenggara dengan baik			5 kegiatan	5 kegiatan	5 kegiatan										
			Persentase formasi jabatan pelaksana yang terisi sesuai kompetensi dan kualifikasi	Jumlah formasi jabatan pelaksana yang terisi sesuai kompetensi dan kualifikasi dibagi jumlah formasi jabatan pelaksana x 100	-	88,4%	95,5% $\frac{1.567}{1.641} \times 100$	Kepegawaian Daerah	Administrasi Kepegawaian		1,297,626,900			Jumlah dokumen administrasi kepegawaian yang diterbitkan				41 dokumen											
										Penyusunan Analisis Kebutuhan, Formasi, dan Pelaksanaan Pengadaan ASN	1,159,076,900	Terlaksananya kegiatan sesuai dengan program kerja korpri	Pembinaan PNS dimulai dari perencanaan, pengadaan sampai penempatan sesuai dengan formasi yang telah ditetapkan, agar PNS mampu mengembangkan kapasitas, kapabilitas, dan karirnya secara sistematis dan berkelanjutan sesuai dengan kebutuhan organisasi	Persentase formasi yang diisi sesuai dengan kompetensi	100%	100%	100%	100%	100%										
			Persentase Database PNS pada SAPK dan SIMPEG yang Update	Jumlah Data Base PNS pada SAPK dan SIMPEG yang Update dibagi jumlah PNS x 100	84,99%	86,8%	94,8% $\frac{4.242}{4.475} \times 100$		Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN		138,550,000	Terlaksananya penyusunan dokumen usulan kenaikan pangkat	Kenaikan pangkat PNS adalah penghargaan yang diberikan atas prestasi kerja dan pengabdian yang bersangkutan terhadap negara. Oleh sebab itu perlu dilakukan koordinasi yang baik dengan BKN	Jumlah dokumen usulan kenaikan pangkat	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen										
			Persentase Database PNS pada SAPK dan SIMPEG yang Update	Jumlah Data Base PNS pada SAPK dan SIMPEG yang Update dibagi jumlah PNS x 100	84,99%	86,8%	94,8% $\frac{4.242}{4.475} \times 100$	Kepegawaian Daerah	Pengelolaan Data dan Informasi ASN		99,355,400			Jumlah buku nominatif pegawai				18 buku											

ES III								ES IV											
Program	Anggaran	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Penjelasan	Kondisi Awal (tahun 2017)	Kondisi Awal (tahun 2018)	Target (Tahun 2021)	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran	Sasaran Kegiatan	Penjelasan	Indikator Kinerja	Target (Tahun 2019)	Target (Tahun 2020)	Target (Tahun 2021)	Target (Tahun 2022)	Target (Tahun 2023)
										Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	99,355,400	Terlaksananya pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Tersedianya data nominatif PNS secara lengkap, baik dan akurat diharapkan dapat menunjang kecepatan dan kemudahan pihak-pihak yang memerlukan data-data kepegawaian di lingkungan Pemerintah Kab. HSS	Jumlah buku nominatif pegawai	18 buku				


 Mangrove, Juli 2018
 Kepala BKD, Diklat,
 H. KIPLI, S.Sos, M.AP
 Jabatan Utama Muda / IV.c
 NIP. 19710711 199101 1 002